



Peran Pemerintah dalam Mengoptimalkan Dinamika Wirausaha: Mendukung Kemajuan Ekonomi Indonesia Khususnya Wilayah Jakarta

Ciek Julyati Hisyam, Kailla Putri Aisyah, Siti Umi Khoiriah, Syafaa Marwah Augea

Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Jakarta

Alamat: Jl. R. Mangun Muka Raya No.11, RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Korespondensi Penulis : kailla1310aisyah@gmail.com

Abstract. *This research analyzes the dynamics of entrepreneurship in Jakarta using theoretical concepts from Pierre Bourdieu, especially the concepts of "arena", "capital", and "habitus". Through this research, we identified Jakarta government programs that support the growth of the entrepreneurial ecosystem, analyzed the challenges faced by Jakarta entrepreneurs, and evaluated the government's strategy in overcoming these challenges. Focusing on the Jakpreneur program and other initiatives, we found that while government efforts have increased accessibility and support for entrepreneurship, challenges remain such as bureaucratic complexity, limited access to capital, and inadequate infrastructure. The government's strategy to overcome these challenges includes providing infrastructure, digitizing public services, empowering MSMEs, supporting technology and innovation, and paying attention to environmental aspects. The implication of this research is the importance of collaboration between the government, private sector and society in building a dynamic and growing entrepreneurial environment, as well as providing a positive impact on the economic growth of Jakarta and Indonesia as a whole.*

Keywords: *Entrepreneurship, Jakarta, Government programs, Challenges, Strategies*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis dinamika wirausaha di Jakarta dengan menggunakan konsep teori dari Pierre Bourdieu, khususnya konsep "arena", "modal", dan "habitus". Melalui penelitian ini, kami mengidentifikasi program-program pemerintah Jakarta yang mendukung pertumbuhan ekosistem wirausaha, menganalisis tantangan yang dihadapi oleh wirausaha Jakarta, serta mengevaluasi strategi pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut. Dengan fokus pada program Jakpreneur dan inisiatif lainnya, kami menemukan bahwa sementara upaya pemerintah telah meningkatkan aksesibilitas dan dukungan bagi wirausaha, masih ada tantangan seperti kompleksitas birokrasi, keterbatasan akses terhadap modal, dan infrastruktur yang belum memadai. Strategi pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut meliputi penyediaan infrastruktur, digitalisasi layanan publik, pemberdayaan UMKM, dukungan terhadap teknologi dan inovasi, serta perhatian terhadap aspek lingkungan. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun lingkungan wirausaha yang dinamis dan berkembang, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan.

Kata kunci: Wirausaha, Jakarta, Program pemerintah, Tantangan, Strategi

LATAR BELAKANG

Wirausaha merupakan individu atau kelompok yang memiliki inisiatif, kreativitas, dan semangat untuk mengorganisir, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan tujuan menciptakan nilai tambah dan memperoleh keuntungan (Nadia F. S. Supit et al., 2022). Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengusaha yang menciptakan dan mengelola bisnis, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja di suatu negara. Dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah, peran wirausaha semakin krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu

Received Mei 15, 2024; Accepted Juni 08, 2024; Published Juli 30, 2024

* Ciek Julyati Hisyam, kailla1310aisyah@gmail.com

negara. Wirausaha tidak hanya berperan sebagai pencipta lapangan kerja, melainkan juga menjadi pemeran utama dalam proses inovasi, penciptaan nilai tambah, dan peningkatan daya saing. Di Indonesia, wirausaha memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan dalam menggerakkan roda perekonomian dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Saat ini wilayah Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan bisnis Indonesia, memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan wirausaha. Dengan populasi yang padat dan tingkat urbanisasi yang tinggi, Jakarta menawarkan berbagai peluang bagi individu yang ingin memulai bisnis atau usaha baru. Namun, meskipun potensinya besar, wirausaha di Jakarta masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti kompleksitas birokrasi, keterbatasan akses terhadap modal, infrastruktur yang belum memadai, serta kekurangan dalam pendidikan kewirausahaan.

Dengan demikian, untuk memahami dinamika wirausaha di Jakarta serta pentingnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan wirausaha yang kondusif, penulis akan menganalisis kajian ini menggunakan 3 konsep teori dari Pierre Bourdieu yaitu konsep "arena", "kapital", dan "habitus". Arena dalam teori Bourdieu mengacu pada ruang persaingan di mana agen bersaing untuk memperebutkan sumber daya tertentu. Untuk terlibat dalam arena tersebut, agen harus mengikuti aturan main yang ditentukan oleh agen lain yang sudah ada di dalamnya, yang disebut habitus. Struktur sosial dalam arena tersebut dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, dan posisi agen yang dapat mengubah struktur arena berdasarkan otoritas yang mereka miliki. Dalam pertarungan di arena, agen memiliki posisi penting dalam memperebutkan sumber daya, di mana otoritas mereka tergantung pada seberapa besar modal yang mereka pertaruhkan dan seberapa baik mereka memainkan permainan. Selain itu, konsep modal dalam teori Bourdieu mencakup 3 modal. Pertama, modal sosial berkaitan dengan jaringan dan relasi antar individu untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan moral. Kedua, modal ekonomi penting untuk memperoleh otoritas produksi dan mempertaruhkan modal dalam arena kultural. Ketiga, modal simbolis meliputi pengumpulan prestise (kehormatan dan reputasi), ketenaran, dan pengakuan yang memiliki dampak dalam dunia wirausaha (Lisma Linda, 2019).

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi program atau inisiatif yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Jakarta untuk mendukung pertumbuhan ekosistem wirausaha yang berkelanjutan dan inklusif, menganalisis tantangan yang masih dihadapi oleh para wirausaha di Jakarta dalam mengembangkan bisnis mereka, serta mengevaluasi strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi tantangan wirausaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Diharapkan makalah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor

swasta, dan masyarakat dalam memperkuat ekonomi yang tangguh dan kompetitif, dimana wirausaha tidak hanya menjadi elemen vital dalam dinamika ekonomi global, tetapi juga menjadi kekuatan utama dalam membangun masa depan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Dengan dukungan yang sesuai dari pemerintah dan kolaborasi antara berbagai pihak, potensi wirausaha dapat dimaksimalkan untuk menciptakan lingkungan wirausaha yang dinamis dan berkembang, serta memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

KAJIAN TEORITIS

1. DEFINISI PERAN PEMERINTAH

Peran adalah perilaku-perilaku yang orang lain harapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau statusnya dalam situasi tertentu. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor sosial, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar, dan cenderung tetap atau konsisten dalam jangka waktu tertentu. Peran adalah tindakan yang orang harapkan dari seseorang saat mereka berhubungan dengan orang lain dalam kegiatan atau situasi tertentu (Ndraha: 2015). Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, peran pemerintah mengacu pada fungsi-fungsi atau tanggung jawab yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, seperti pengaturan ekonomi, penyediaan layanan publik, penegakan hukum, dan sebagainya.

Pemerintah berasal dari kata "*governor*" dalam bahasa Yunani yang berarti "pengarah" atau "pengemudi". Secara umum, pemerintah adalah lembaga yang mengarahkan kehidupan masyarakat. Ada juga pendapat bahwa istilah "*government*" berasal dari bahasa Perancis "*gouvernance*" yang digunakan pada abad ke-14 untuk menyebut aparat kerajaan yang setia. Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dengan masyarakat suatu negara. Tugas utamanya adalah membuat dan melaksanakan keputusan untuk mencapai tujuan ini, menggunakan kekuasaan yang sah atas sumber daya masyarakat.

Peran pemerintah adalah fungsi-fungsi atau tanggung jawab yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu guna mencapai tujuan bersama dengan masyarakat suatu negara. Ini meliputi membuat keputusan dan melaksanakannya dengan menggunakan kekuasaan yang sah atas sumber daya masyarakat, seperti mengatur eksploitasi sumber daya alam, menetapkan tarif, membuat aturan, melarang tindakan tertentu, dan kegiatan lainnya demi menciptakan kehidupan sosial yang diharapkan oleh masyarakat.

2. PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

Dalam buku "Ekonomi Publik" oleh Bonaraja Purba (2021), peran pemerintah dalam perekonomian dipahami sebagai fungsi dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan ekonomi. Peran pemerintah dalam perekonomian negara adalah sebagai berikut:

1. **Produsen** : Pemerintah berperan sebagai produsen, yang artinya mereka memproduksi barang atau jasa untuk kepentingan publik. Misalnya, pemerintah daerah dapat memproduksi dan menyediakan air bersih melalui perusahaan air minum daerah (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. **Konsumen** : Peran kedua pemerintah adalah sebagai konsumen. Pemerintah sebagai konsumen dapat membeli berbagai barang dan jasa untuk kebutuhan operasional dan proyek-proyek publik. Contohnya adalah pemerintah membeli kendaraan untuk dinas, membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan, atau memesan layanan konsultasi dari perusahaan swasta untuk proyek-proyek pengembangan.
3. **Regulator** : Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai pengendali perekonomian atau regulator. Di samping kebijakan fiskal dan moneter yang telah disebutkan, peran pengendali perekonomian pemerintah juga mencakup pengawasan dan pembuatan regulasi. Misalnya, pemerintah menetapkan aturan lingkungan untuk industri agar meminimalkan dampak lingkungan, atau mengatur kebijakan ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak pekerja.

Masih dalam sumber yang sama, peran pemerintah lainnya adalah melalui pengeluaran publik, di mana anggaran digunakan untuk menyediakan layanan publik yang penting bagi masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam perekonomian bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi perkembangan masyarakat secara menyeluruh, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

3. KEWIRAUSAHAAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008), kewirausahaan adalah kemampuan atau jiwa untuk berwirausaha atau melakukan usaha dengan cara mengadakan dan

mengelola perusahaan serta mempergunakan faktor-faktor produksi (tenaga kerja, modal, teknologi, dan sebagainya) untuk menghasilkan barang atau jasa guna memperoleh keuntungan atau laba. Dalam materi pelatihan yang diberikan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional (2010), kewirausahaan adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau produk baru dengan cara yang kreatif dan inovatif, serta memiliki keberanian untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul akibat keputusan yang diambil dalam proses penciptaan tersebut.

Kewirausahaan merupakan suatu bidang yang mempelajari bagaimana mengembangkan semangat kreativitas dan keberanian untuk mengambil risiko dalam pekerjaan demi menciptakan hasil yang bernilai (Irham Fahmi, 2014). Dalam kewirausahaan, kita belajar bagaimana menciptakan ide-ide baru, melihat peluang, dan mengelola usaha dengan tujuan meraih kesuksesan. Kewirausahaan melibatkan inovasi, yang artinya menciptakan hal-hal baru atau solusi untuk masalah yang ada. Ini juga mencakup kemampuan untuk menghadapi risiko, karena tidak selalu ada jaminan keberhasilan dalam bisnis atau proyek yang kita jalankan. Namun, dengan semangat dan kerja keras, kewirausahaan bisa menjadi jalan untuk mewujudkan impian dan mencapai tujuan yang kita inginkan.

Dengan kata lain, seorang wirausahawan adalah agen perubahan yang mampu mengubah sumber daya yang ada untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan non-ekonomi, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat secara keseluruhan.

4. TEORI BOURDIEU

Dalam konsep Bourdieu, penguasaan sumber daya dapat dicapai melalui tiga konsep utama, yakni habitus, arena, dan modal. Ketiga konsep ini tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling berkaitan dalam memperoleh akses terhadap suatu sumber daya khusus.

- **KONSEP ARENA**

Konsep arena menggambarkan bagaimana posisi agen dapat berubah, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur arena itu sendiri. Dalam suatu bidang, setiap aktor politik memiliki posisi yang berbeda yang dapat diakses atau dibentuk, menciptakan posisi baru yang kemudian bersaing dengan penantang lain untuk mengendalikan kepentingan atau aset dalam bidang tersebut. Pemikiran Pierre Bourdieu, yang diterjemahkan oleh Maizer, mengidentifikasi tiga

komponen dalam menganalisis arena: Pertama, membandingkan dominasi arena kekuasaan dengan mencari hubungan antara tiap arena khusus dengan arena politik. Kedua, memetakan struktur objektif dari relasi dan posisi dalam arena yang telah ditentukan. Ketiga, memahami habitus para elit yang menempati posisi berbeda dalam arena tersebut (Maizer : 2009).

● KONSEP HABITUS

Habitus menurut Bourdieu (dalam Mangihut Siregar : 2016) merupakan elemen sentral dalam sintesis teoritisnya. Menurutnya, habitus adalah sistem yang terbentuk dari gabungan antara struktur objektif dari lingkungan sosial dan pengalaman personal sejarah individu. Dengan kata lain, habitus menciptakan kerangka kerja mental yang mempengaruhi cara individu berperilaku dan berinteraksi dengan dunia, sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan pengalaman sebelumnya. Habitus adalah cara kita belajar dan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Ini terjadi sepanjang hidup kita, seiring kita berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Ini bukanlah sesuatu yang kita bawa sejak lahir, melainkan sesuatu yang kita pelajari secara tidak sadar dari pengalaman hidup kita.

● KONSEP MODAL

Modal adalah bentuk relasi sosial, yaitu energi sosial yang efektif hanya di dalam arena di mana ia dihasilkan dan direproduksi. Setiap jenis kepemilikan terkait dengan kelas sosial dinilai dan efektivitasnya ditentukan oleh peraturan khusus di setiap arena. Dalam praktiknya, semua kecenderungan dan kepemilikan objektif memiliki peran signifikan dalam arena tertentu (Wanda Listiani, 2013). Pendekatan ini menekankan bahwa kelas sosial tidak dapat dipahami secara terisolasi, tetapi selalu dalam hubungannya dengan kelas sosial lainnya. Dalam konsep modal, modal dibagi menjadi 3 jenis (Lisma Linda : 2019). **Pertama**, Modal sosial merujuk pada hubungan dan koneksi antara individu dan kelompok, yang bertujuan mendapatkan pengakuan dan dukungan moral dari sesama anggota dalam jaringan tersebut. Dengan pengakuan dari kelompok, aktor lebih mudah mendapatkan dukungan moral dalam aktivitas dan menghadapi tantangan. Hubungan ini juga memungkinkan saling bergantung dan memberikan dukungan satu sama lain untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Dengan demikian, modal sosial tidak hanya mempengaruhi interaksi sosial, tetapi juga penting dalam pembentukan dukungan moral dan akses terhadap sumber daya di masyarakat. **Kedua**, modal ekonomi dipandang Bourdieu penting dalam struktur sosial. Selain

membeli atau berinvestasi, modal ekonomi memberikan kekuasaan dan otoritas sosial. Contohnya, di dunia penerbitan, modal ekonomi memungkinkan penerbit mencetak dan mendistribusikan buku, meningkatkan status dan pengaruh mereka. Dengan modal ekonomi yang kuat, seseorang dapat dengan mudah mengumpulkan modal sosial dan budaya, seperti jaringan dan pengetahuan, yang mendukung kemampuan bersaing di berbagai arena sosial. **Ketiga**, Modal simbolik merujuk kepada tingkat prestise, ketenaran, penghormatan, atau kehormatan yang terkumpul yang didasarkan pada hubungan antara pengetahuan dan pengakuan. Modal simbolik memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, terutama dalam dunia bisnis dan karier. Kehormatan dan legitimasi berfungsi sebagai modal awal dalam investasi 'kepercayaan,' yang diukur berdasarkan pengalamannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*), yang memanfaatkan buku dan literatur lain sebagai sumber utama. Penelitian kualitatif menghasilkan informasi dalam bentuk catatan dan data deskriptif dari teks yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, penting untuk melakukan analisis deskriptif secara menyeluruh untuk menggambarkan, menginterpretasikan, dan menjelaskan data dari berbagai sumber. Analisis ini membantu memahami sudut pandang dan konsep yang berkaitan dengan topik penelitian, serta mendalami fenomena yang diamati. Analisis deskriptif juga memungkinkan peneliti mengeksplorasi kompleksitas dan konteks topik penelitian, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam. Oleh karena itu, metode ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana peran pemerintah memengaruhi dinamika wirausaha dalam mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Dengan mempertimbangkan perspektif kewarganegaraan ganda, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana identitas dan loyalitas ganda memengaruhi sikap dan tindakan wirausaha terhadap pemerintah, serta dampaknya terhadap kemajuan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Atau Inisiatif Pemerintah Khususnya Pemerintah Jakarta Dalam Mendukung Wirausaha

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian Jakarta. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta dalam Media Jaya Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2020), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta sepanjang tahun 2019 mencapai 5,9 persen, dimana 75,48 persen berasal dari sektor UMKM. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa UMKM berperan besar dalam mengakomodasi tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta telah memulai program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), yang dikenal dengan nama Jakpreneur, dengan target menciptakan 200 ribu wirausahawan baru.

Vitoria M & Egidius P (2021) dalam Kompas.com menjelaskan, sebelum mengadopsi nama Jakenterpreneur, program ini dikenal sebagai "One Kecamatan One Center for Entrepreneurship" (OK-OCE), yang diinisiasi oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno selama masa kampanye Pilkada DKI 2017. Namun, pada tahun 2020, OK-OCE berganti nama menjadi Jakpreneur, yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan UMKM dengan melibatkan berbagai pihak seperti start-up, lembaga pendidikan, dan institusi keuangan dalam ekosistem kewirausahaan termasuk perusahaan seperti Grab, Gojek, Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia, serta 47 perguruan tinggi dan koperasi. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan kemandirian usaha.

Mengenai dasar program ini berada pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2020 tentang PKT yang menetapkan kriteria pencapaian seperti peningkatan omset, aset, dan jumlah karyawan (Media Jaya Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2020). Pergub ini juga menetapkan ketentuan tentang keanggotaan PKT, yang memungkinkan peserta untuk mengikuti berbagai tahap tanpa harus mengikuti urutan P1-P7. Warga yang bukan penduduk DKI Jakarta namun telah tinggal di sana selama dua tahun juga dapat mengikuti program Jakpreneur. Program ini memberikan berbagai fasilitas, termasuk pelatihan kewirausahaan, pemasaran, akses permodalan, dan kemudahan mendapatkan tempat usaha di ruang publik.

Selain program Jakpreneur, pemerintah Jakarta tengah berkolaborasi dengan PT HM Sampoerna TBK melalui Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) bersama Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (INOTEK) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam inisiatif UMKM untuk Indonesia menuju Transformasi Digital 2024 (Sakina R.D.S., 2024 dalam Kompas.com). Tujuan program ini adalah untuk memberikan

pendampingan kepada UMKM agar dapat meningkatkan kualitasnya melalui digitalisasi. Program ini akan mencakup serangkaian pelatihan dan lokakarya, termasuk topik digitalisasi, perizinan usaha, manajemen bisnis, dan lainnya. Nantinya, 10 peserta terbaik akan berkompetisi dalam acara IDEAL (Inovasi dan Digitalisasi Entrepreneur untuk Akselerasi Lanjutan) yang dijadwalkan pada bulan Agustus 2024 dan akan menerima pendampingan untuk meningkatkan kapasitas produksi dari BRIN.

Pada tingkat nasional, salah satu program pemerintah yang mendukung wirausaha adalah SMESCO, yang merupakan singkatan dari "Small and Medium Enterprises and Cooperatives" atau Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. SMESCO Indonesia didirikan pada Maret 2007 dengan tujuan mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia ke pasar internasional. SMESCO secara resmi dikenal sebagai Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM), yang beroperasi sesuai dengan Keputusan Menteri KUKM No 19.3/Per/M.KUKM/VII/2006 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 159/KMK.05/2007. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan promosi dan pemasaran kepada UKM Indonesia serta membekali mereka dengan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang di pasar domestik dan global.

2. Tantangan Yang Masih Dirasakan Wirausaha Jakarta Dalam Pengembangan Bisnis

Tantangan dalam mengembangkan bisnis bagi seorang wirausaha pasti akan selalu ada, karena masyarakat berdinamika dan perubahan adalah suatu keniscayaan. Hal itu memerlukan keterampilan, kemampuan adaptasi, serta mental yang tangguh bagi seorang wirausaha untuk dapat mengatasi tantangan yang hadir ketika menjalankan usaha. Di Jakarta khususnya, walaupun pemerintah daerah sudah mengeluarkan beberapa program yang mendukung seorang wirausaha, tetap saja masih ada tantangan yang perlu dihadapi.

Salah satu program untuk mendukung pengembangan bisnis yaitu Jakpreneur. Walaupun Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan fasilitas perizinan, namun banyak dari wirausahawan yang masih tidak mengerti untuk mengurus berbagai dokumen yang diperlukan untuk perizinan. Hal tersebut dapat menghambat pengembangan bisnis karena proses legalisasi usaha mereka yang lambat. Tidak hanya itu, terdapat tantangan lain yang perlu dihadapi wirausaha di Jakarta, yakni dalam pemasaran dan tingginya kompetisi yang ada. Persaingan

yang tinggi membuat mereka harus mempunyai strategi pemasaran yang baik dan dibuat secara matang agar tetap dapat bersaing di tengah persaingan yang ketat. Kreativitas dan inovasi diperlukan dalam persaingan ini, serta kualitas dan daya tarik dari produk atau jasa yang mereka tawarkan diperlukan di tengah lingkungan bisnis yang dinamis di Jakarta.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan SMESCO untuk mendukung promosi dan pemasaran UKM di dalam negeri. Namun, sarana tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh sebagian pengusaha karena keterbatasan informasi dan sumber daya yang mereka miliki. Target pemerintah yang ingin menciptakan 1 juta wirausaha baru di Indonesia pada tahun 2024, sepertinya tidak selalu berjalan mulus karena masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi di dalamnya. Wirausaha di Jakarta, terlebih wirausaha yang masih merintis usahanya, memerlukan banyak dukungan dalam akses pelatihan keterampilan dan mindset seorang wirausaha, permodalan, dan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan wirausaha baru. Apabila tantangan-tantangan tersebut dapat teratasi, dengan begitu UKM yang ada di dalam negeri, terlebih di Jakarta, diharapkan dapat mengembangkan bisnis mereka dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Dalam artikel yang ditulis oleh bappeda.jakarta.go.id dengan judul "Tantangan Global Perekonomian Jakarta 20 Tahun ke Depan," pada 14 Mei 2024, disebutkan bahwa terdapat tantangan dan perencanaan ekonomi Jakarta dalam 20 tahun mendatang. Walaupun situasi global saat ini tidak pasti, tetapi Indonesia memperlihatkan pertumbuhan ekonom yang stabil. Namun, hal itu tidak luput dari tantangan bagi Jakarta, sebagai salah satu kota global. Ketika Jakarta sudah bukan lagi ibu kota di masa mendatang, untuk itu diperlukannya daya tarik yang kuat untuk menarik investor asing. Jakarta perlu beradaptasi dengan memerhatikan peningkatan sumber daya manusia, memberdayakan kebudayaan, serta memanfaatkan pertukaran informasi, agar tetap bergairah dalam dunia bisnis. Kebijakan untuk investasi juga perlu diperhatikan agar tetap menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, diharapkan Jakarta tetap menarik bagi investor, dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

Paul Jesemann, menulis dalam artikel yang berjudul "*How Indonesia can overcome its own digitalization challenges*" pada laman The Jakarta Post pada 14 November 2022, mengungkapkan bahwa potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital masih memiliki hambatan dalam mewujudkannya. Hal itu didasarkan pada ketersediaan dan jangkauan jaringan 5G yang tertinggal dari negara-negara

lain di kawasan Asia-Pasifik. Indonesia menempati peringkat terbawah dalam ketersediaan dan jangkauan 5G diantara 10 ekonomi terbesar di Aisa-Pasifik. Hal ini menjadi tantangan dalam mengembangkan bisnis secara digital, terutama di daerah-daerah yang masih terpelosok dan keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur yang minim membuat proses transaksi dan distribusi barang terhambat, serta bagi wirausaha memerlukan biaya lebih untuk menunjang operasional. Tidak selesai sampai disitu saja, regulasi kompleks yang ada di Indonesia juga menghambat perkembangan bisnis yang sedang dijalani.

Tantangan-tantangan yang bervariasi dalam pengembangan bisnis di Indonesia, terutama Jakarta, memerlukan langkah-langkah strategis agar pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut. Wirausaha perlu terus berinovasi, beradaptasi, meningkatkan keterampilan, serta memanfaatkan dengan baik program-program yang telah disediakan oleh pemerintah. Diperlukan juga perbaikan infrastruktur dan akses digital, juga kerjasama diantara *stakeholder* demi teratasinya tantangan yang ada dalam pengembangan bisnis.

3. Strategi pemerintah dalam mengatasi tantangan wirausaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan wirausaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jakarta, sebagai pusat ekonomi negara, memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan pengembangan usaha, sehingga berbagai langkah strategis telah diambil untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertama, pemerintah DKI Jakarta fokus pada peningkatan aksesibilitas dan dukungan bagi para wirausaha melalui pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Dalam hal ini, pemerintah telah berinvestasi dalam pembangunan pusat-pusat inkubasi bisnis dan coworking spaces yang memberikan ruang bagi para wirausaha untuk berkolaborasi dan mengembangkan ide-ide bisnis mereka. Selain itu, infrastruktur transportasi yang lebih baik, seperti perluasan jalur MRT dan LRT, juga membantu meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas bagi para pengusaha di kota ini.

Kedua, pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan birokrasi yang sering kali menjadi hambatan bagi para wirausaha. Melalui digitalisasi layanan publik, seperti penerapan sistem perizinan online, pemerintah Jakarta berusaha untuk mempercepat dan mempermudah proses pengurusan izin usaha. Langkah ini

tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Ketiga, pemerintah DKI Jakarta mendorong inklusivitas dalam ekonomi dengan mengembangkan program-program pemberdayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu program unggulan adalah pemberian akses pembiayaan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Selain itu, pelatihan kewirausahaan dan pendampingan bisnis juga diberikan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak wirausaha baru yang mampu berkontribusi terhadap perekonomian kota.

Keempat, pemerintah Jakarta juga menekankan pentingnya adopsi teknologi dan inovasi dalam dunia usaha. Dengan mendukung startup teknologi dan ekosistem digital, pemerintah mendorong transformasi digital di berbagai sektor ekonomi. Salah satu inisiatif penting adalah penyelenggaraan berbagai acara dan kompetisi startup yang memberikan platform bagi inovator muda untuk memamerkan ide-ide kreatif mereka. Dukungan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis di Jakarta.

Kelima, untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pemerintah DKI Jakarta memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil. Program-program yang berfokus pada pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan transportasi ramah lingkungan terus dikembangkan. Misalnya, pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penerapan teknologi hijau di sektor industri. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan kota yang lebih sehat dan nyaman bagi penduduknya.

Dengan menggabungkan berbagai strategi tersebut, pemerintah DKI Jakarta berupaya menciptakan ekosistem wirausaha yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

4. ANALISIS MENGGUNAKAN TEORI BOURDIEU

Pierre Bourdieu terkenal dalam mengembangkan teori praktik yang berguna untuk menjelaskan bagaimana seseorang atau kelompok berinteraksi dalam masyarakat. Dalam teori

tersebut konsep utamanya adalah “arena” yang menjadi tempat terjadinya praktik-praktik sosial di masyarakat. Dalam teori ini, arena-arena yang ada tidak hanya berupa fisik, tetapi juga ruang lingkup seperti jaringan sosial, lingkungan regulasi, dan juga pasar. Di Jakarta, arena-arena tersebut terdapat pada jaringan bisnis, kebijakan, pasar, maupun akses terhadap modal dan infrastruktur. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa dalam berbagai bidang kehidupan sosial, individu dan kelompok berkompetisi untuk mengakses sumber daya dan mempertahankan atau meningkatkan posisi sosial mereka, yang dimana hal tersebut termasuk dalam "arena".

Dalam teori Bourdieu, terdapat konsep kapital yang merujuk pada sumber daya yang digunakan untuk menjaga maupun memperkuat posisi mereka. Bagi para wirausaha di Jakarta, modal finansial sangat diperlukan untuk pengembangan bisnis mereka, mulai dari pembayaran gaji karyawan, membeli bahan baku produk, hingga pada biaya untuk mengembangkan produk atau layanan baru. Tidak hanya modal finansial, jaringan sosial juga diperlukan untuk memperluas peluang bisnis, dan berkolaborasi dengan berbagai mitra yang ada di Jakarta. Jaringan sosial bisnis ini dapat melibatkan pengusaha, investor, serta pelanggan yang terjalin melalui pertemuan bisnis, acara-acara bisnis, *networking events*, hingga berkontribusi dalam acara atau proyek tertentu. Seperti yang sama-sama kita ketahui, persaingan wirausaha di Jakarta sangat ketat. Oleh karena itu, para wirausaha perlu memiliki jaringan sosial yang kuat untuk membuka peluang baru dan mendukung perkembangan usaha yang mereka jalani.

Kemudian, pembuatan kebijakan yang berguna untuk mendukung para wirausaha di Jakarta pun perlu diperhatikan, karena berdasarkan teori arena Bourdieu struktur sosial yang ada di masyarakat mempengaruhi kehidupan bisnis. Dengan begitu, kebijakan yang ada sebaiknya tidak terkesan dibuat untuk penguasa korporat, tetapi juga mendukung semua wirausaha, tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam hal ini, pemerintah berperan penting dalam mengatasi hambatan birokrasi dengan menciptakan regulasi yang jelas dengan menyederhanakan proses perizinan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi para wirausaha.

Selain itu, konsep habitus dalam teori Bourdieu juga penting untuk dipertimbangkan dalam analisis terhadap wirausaha di Jakarta. Habitus merujuk pada pola-pola pikir, sikap, dan tindakan yang menjadi bagian dari kepribadian seseorang yang telah terbentuk melalui pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dalam konteks wirausaha, habitus dapat mempengaruhi cara pandang dan tindakan para wirausaha dalam menghadapi tantangan dan peluang bisnis di Jakarta. Misalnya, seorang wirausaha dengan habitus yang inklusif dan proaktif cenderung

lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan lebih siap menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis di Jakarta.

Dalam praktiknya, habitus ini juga dapat mempengaruhi bagaimana para wirausaha memanfaatkan modal simbolik, seperti reputasi dan kepercayaan, yang mereka miliki. Modal simbolik ini sering kali menjadi faktor penentu dalam membangun dan mempertahankan jaringan sosial yang kuat, serta dalam menarik investasi dan dukungan dari berbagai pihak. Seorang wirausaha yang memiliki reputasi baik dan kepercayaan dari berbagai kalangan akan lebih mudah mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, membangun dan menjaga modal simbolik menjadi salah satu strategi penting bagi wirausaha di Jakarta untuk bersaing di arena bisnis yang ketat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap program-program pemerintah dan tantangan yang dihadapi oleh para wirausaha di Jakarta, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada upaya yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem wirausaha, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Program seperti Jakpreneur dan inisiatif lainnya telah membantu dalam memberikan akses dan dukungan kepada para wirausaha, namun masih ada kebutuhan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan akses terhadap modal serta infrastruktur. Selain itu, tantangan seperti tingginya persaingan dan keterbatasan akses terhadap informasi juga perlu diatasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan wirausaha. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Jakarta perlu terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, dalam mengembangkan program-program yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Diperlukan upaya untuk menyederhanakan regulasi dan proses perizinan, meningkatkan akses terhadap pelatihan kewirausahaan dan pendampingan bisnis, serta memperluas akses terhadap modal dan infrastruktur. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan dalam penyediaan informasi dan pendidikan kewirausahaan agar para wirausaha dapat mengoptimalkan potensi mereka dan bersaing secara lebih efektif di pasar yang dinamis. Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai implementasi program-program pemerintah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program-program

yang ada juga penting untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi perkembangan ekosistem wirausaha di Jakarta.

DAFTAR REFERENSI

- Bappeda Jakarta. (2024). "Tantangan Global Perekonomian Jakarta 20 Tahun ke Depan," (Diakses pada 23/05/2024, 17.35) dari: <https://bappeda.jakarta.go.id/tantangan-global-perekonomian-jakarta-20-tahun-kedepan>
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. 2023. "Jakarta entrepreneur". (Diakses pada 24/05/2024, 21.00) dari: <https://www.jakarta.go.id/jakpreneur#:~:text=Jakarta%20Entrepreneur%20adalah%20platform%20kreasi,institusi%20pendidikan%2C%20maupun%20institusi%20pebiayaan.>
- Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). KEWIRAUSAHAAN: Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan Kepala Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Irham Fahmi. (2014). *Kewirausahaan Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Jeemann, P. (2022). "How Indonesia can overcome its own digitalization challenges." The Jakarta Post. Diakses pada 23/05/2024, 18.40 dari: <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/11/14/how-indonesia-can-overcome-its-own-digitalization-challenges.html>
- Linda, L. (2019). Kekuasaan dan Kepentingan Internal Lembaga: Kajian Arena Produksi Kultural Bourdieu (Studi Kasus Penerbit Bandar Publishing di Kota Banda Aceh). (3)2, 157-177.
- Listiani, W. (2013). Struktur Modal Pierre Bourdieu pada Pelaku Kreatif Grafis Fashion Bandung.
- Mantelan, V., & Patnistik, E. (2021). Pemprov DKI: Program Jakpreneur Anies Memang Diukur Dari Jumlah Pendaftar Saja. Diakses pada 2 Juni 2024, pukul 19.00 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/15/12031841/pemprov-dki-program-jakpreneur-anies-memang-diukur-dari-jumlah-pendaftar>
- Media Jaya Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Edisi 03/2020. https://jakita.jakarta.go.id/media/download/ind/edisi_3_2020.pdf
- Purba, Bonaraja, dkk. (2021). *Ekonomi Publik*. Cetakan 1. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Putri. (2024). "Ini Upaya Pemerintah Indonesia Tingkatkan Rasio Kewirausahaan" (Diakses pada 24/05/2024, 21.50) dari: <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/820160/ini-upaya-pemerintah-indonesia-tingkatkan-rasio-kewirausahaan>

- Setiawan, DRS. (2024). "120 UMKM DKI Jakarta Ikut Program Transformasi Digital Sampoerna" (Diakses pada 24/05/2024, 21.15) dari: <https://money.kompas.com/read/2024/03/08/201948826/120-umkm-dki-jakarta-ikut-program-transformasi-digital-sampoerna?page=all>.
- Siregar, Mangihut. (2016). "Laporan Riset Teori 'Gado-gado' Pierre-Felix Bourdieu." *Jurnal Studi Kultural, Universitas Udayana*, (1)2, 79-82.
- SMESCO Indonesia. Accounting SMESCO INDONESIA Comments. (Diakses pada 24/05/2024, 21.30) dari: <https://accounting.binus.ac.id/2018/12/26/smesco-indonesia/>
- Supit, N.F.S. et al. (2022). *Wirausaha Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Society, Volume 2, No. 3.
- Taliziduhu Ndraha. (2015). *Kybernology : ilmu pemerintahan baru 1*. Jakarta : Rineka Cipta,.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.